

Tranformasi Pendidikan pada Masa Kolonial: Relasi Pendidikan Barat dan Pendidikan Pribumi Awal Abad Ke-20

Ade Hesti NF¹, Faisal Ibnu Ridlo², Natia Syafii Al Gibran Wijayani³, Sutrimo Purnomo⁴

UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia¹⁻⁴

Email Korrespondensi: adehesti169@gmail.com¹, ibnuridlofaisalmaulana@gmail.com², natiawijayani@gmail.com³, trimo@uinsaizu.ac.id⁴

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 16 Januari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This study discusses the transformation and dualism of the education system in the Dutch East Indies during the early twentieth century as an impact of the implementation of the Ethical Policy by the colonial government. The policy brought significant changes in the field of education, yet in practice it created unequal educational systems between Europeans and indigenous people. Western education was organized by the colonial government with the aim of producing skilled administrative workers who were loyal to colonial interests, while indigenous education developed through traditional institutions such as Islamic boarding schools (pesantren), which emphasized religious education and moral values. In addition, priyayi education emerged as a form of education intended for indigenous aristocrats as part of the colonial strategy to maintain the social structure of society. This research aims to describe the forms of educational dualism and explain the characteristics of European education, priyayi education, and santri education in the early twentieth century. The study employed a qualitative method with a historical approach through library research using books, journals, and relevant scientific documents as sources. The findings indicate that the colonial education system was discriminatory and hierarchical based on social status, race, and political interests of the colonial government. This condition resulted in unequal access to education for indigenous communities and demonstrated differences in educational goals, curriculum, and opportunities among social groups.

Keywords: Educational Dualism, Colonial Education, Western Education, Priyayi, Santri..

ABSTRAK

Kajian ini membahas transformasi dan dualisme sistem pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sebagai dampak dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan tersebut membawa perubahan dalam bidang pendidikan, namun pada praktiknya melahirkan sistem pendidikan yang bersifat berbeda dan tidak setara antara golongan Eropa dan masyarakat pribumi. Pendidikan Barat diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dengan orientasi mencetak tenaga administrasi yang terampil dan loyal terhadap kepentingan kolonial, sementara pendidikan pribumi berkembang melalui lembaga tradisional seperti pesantren yang menitikberatkan pada pendidikan agama dan pembentukan moral. Selain itu, muncul pula pendidikan priyayi yang diperuntukkan bagi kalangan bangsawan pribumi sebagai bagian dari strategi kolonial dalam mempertahankan struktur sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dualisme pendidikan kolonial serta menjelaskan karakteristik pendidikan Eropa, pendidikan priyayi, dan pendidikan santri pada awal abad ke-20. Metode penelitian yang digunakan

ialah metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan pada masa kolonial bersifat diskriminatif dan berlapis berdasarkan status sosial, ras, dan kepentingan politik pemerintah kolonial. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan tujuan, kurikulum, dan kesempatan pendidikan di setiap golongan masyarakat.

Kata Kunci: Dualisme Pendidikan, Pendidikan Kolonial, Pendidikan Barat, Priyayi, Santri.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat dan bangsa karena melalui pendidikan nilai, pengetahuan, serta keterampilan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks sejarah Indonesia, perkembangan pendidikan tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Belanda yang memperkenalkan sistem pendidikan Barat di wilayah Hindia Belanda. Masuknya sistem pendidikan tersebut membawa perubahan dalam struktur pendidikan yang sebelumnya telah berkembang di kalangan masyarakat pribumi melalui lembaga-lembaga tradisional. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Politik Etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada sebagian masyarakat pribumi untuk mengakses pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian, praktik pendidikan pada masa itu masih memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan yang didasarkan pada status sosial serta latar belakang etnis. Sistem pendidikan yang berlaku bersifat hierarkis dan diskriminatif, di mana lembaga pendidikan dengan kualitas terbaik lebih diprioritaskan bagi orang Eropa dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil kalangan elit pribumi. Sementara itu, masyarakat pribumi tetap mempertahankan dan mengembangkan sistem pendidikan yang telah lama tumbuh secara mandiri, khususnya melalui lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

Lembaga ini berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan agama, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai moral dan sosial kepada para santri. Dalam sistem pesantren, kiai memiliki posisi sentral sebagai pemimpin dan pengajar yang membimbing para santri dalam proses pembelajaran. Keberadaan dua sistem pendidikan yang berbeda tersebut menunjukkan adanya dualisme pendidikan dalam masyarakat Hindia Belanda, yaitu pendidikan Barat yang bersifat modern dan dikelola oleh pemerintah kolonial serta pendidikan pribumi yang berkembang melalui lembaga tradisional. Perbedaan sistem, tujuan, serta akses pendidikan ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan sosial yang terjadi pada masa kolonial, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pendidikan di Indonesia pada periode selanjutnya. Oleh karena itu, kajian mengenai dualisme pendidikan Barat dan pribumi menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika Pendidikan pada masa kolonial

terbentuk serta bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia (Sugeng Haryanto: 2012).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam fenomena dualisme pendidikan antara pendidikan Barat dan pendidikan pribumi pada awal abad ke-20. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menelaah berbagai konsep, teori, serta fakta sejarah yang berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan pada masa kolonial, khususnya yang menyangkut pendidikan Eropa, pendidikan priyayi, dan pendidikan santri. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan kondisi pendidikan pada masa tersebut secara sistematis, tetapi juga melakukan analisis terhadap berbagai fenomena yang muncul akibat perbedaan sistem pendidikan yang berkembang dalam masyarakat Hindia Belanda. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian.

Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen sejarah yang membahas kebijakan pendidikan pada masa kolonial, pelaksanaan Politik Etis, dan perkembangan pendidikan Islam melalui lembaga pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Melalui proses analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika dualisme pendidikan pada masa kolonial serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia (Fakhriansyah: 1930).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Pendidikan pada Masa Kolonial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pendidikan merupakan sistem pendidikan yang membedakan layanan pendidikan berdasarkan golongan masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, pendidikan tidak diberikan secara merata kepada seluruh rakyat. Pemerintah kolonial membuat pemisahan yang jelas antara sekolah untuk orang Eropa, golongan Timur Asing, dan masyarakat pribumi. Sekolah untuk orang Eropa memiliki fasilitas, kurikulum, dan kualitas pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan pendidikan untuk pribumi cenderung terbatas dan hanya bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mendukung administrasi pemerintahan kolonial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan pada masa itu bersifat diskriminatif dan mencerminkan struktur sosial yang hierarkis dalam masyarakat kolonial (Madyan, dkk., 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dualisme pendidikan berdampak terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Ketidakmerataan dalam

memperoleh akses pendidikan mengakibatkan sebagian besar masyarakat pribumi tidak mendapatkan kesempatan belajar yang layak. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya perkembangan intelektual masyarakat sekaligus memperkuat adanya lapisan sosial pada masa pemerintahan kolonial. Namun demikian, berdirinya berbagai lembaga pendidikan yang diprakarsai oleh masyarakat pribumi menjadi salah satu bentuk usaha untuk mengatasi keterbatasan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial (Wahyudi, 2018).

Sistem dualisme pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak hanya mempengaruhi perkembangan lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang cukup besar terhadap struktur masyarakat di Hindia Belanda. Pemisahan sistem pendidikan berdasarkan ras dan status sosial secara tidak langsung menciptakan stratifikasi baru dalam masyarakat. Kelompok yang memperoleh pendidikan Barat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, maupun sektor administrasi kolonial. Sementara itu, sebagian besar masyarakat pribumi yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal tetap berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang terbatas. Dalam konteks ini, pendidikan kolonial berfungsi sebagai sarana reproduksi struktur sosial yang menguntungkan pemerintah kolonial. Pendidikan tidak diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya kepada kelompok tertentu yang dianggap mampu membantu jalannya pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pendidikan Barat umumnya hanya dapat diakses oleh anak-anak Eropa, kelompok Timur Asing, serta sebagian kecil elit pribumi. Keadaan tersebut menyebabkan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memperkuat kesenjangan sosial dalam masyarakat kolonial. (S. Nasution, 2011).

Meskipun demikian, sistem pendidikan Barat yang terbatas tersebut secara tidak langsung juga melahirkan kelompok intelektual baru dari kalangan pribumi. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memperoleh pendidikan modern dan mulai mengenal berbagai pemikiran baru yang berkembang di dunia Barat seperti liberalisme, demokrasi, serta gagasan mengenai kebebasan dan persamaan hak. Pengetahuan tersebut kemudian mendorong munculnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat terdidik. Para tokoh pergerakan nasional seperti Soetomo, Ki Hadjar Dewantara, dan Tiipto Mangoenkoesoemoe merupakan contoh tokoh yang memperoleh pendidikan Barat dan kemudian memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia (Lawn, 2011).

Selain melahirkan kelompok intelektual baru, sistem pendidikan kolonial juga mendorong munculnya berbagai organisasi sosial dan politik yang menjadi cikal bakal gerakan nasional Indonesia. Pada awal abad ke-20 mulai bermunculan organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1912, serta berbagai organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut sebagian besar didirikan oleh kaum terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat pribumi. Dengan demikian, pendidikan kolonial yang pada awalnya dirancang untuk mendukung kepentingan pemerintah Belanda justru

memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia (Azyumardi Azra: 2012).

Pada awal abad ke-20, hubungan antara pendidikan Barat dan pendidikan Islam mulai mengalami dinamika yang cukup menarik. Di satu sisi, sebagian kalangan umat Islam memandang pendidikan Barat sebagai sesuatu yang perlu dipelajari karena berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran bahwa pendidikan Barat dapat membawa pengaruh budaya dan pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, muncul berbagai upaya untuk melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam dengan menggabungkan unsur pendidikan modern ke dalam lembaga pendidikan tradisional (Zamakhshari Dhofier: 2011).

Pendidikan Barat Hindia Belanda

Pendidikan Barat di Indonesia muncul pada masa penjajahan Belanda. Pada awalnya kedatangan Belanda hanya bermotif ekonomi, yaitu mencari keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Namun setelah lama berkuasa, Belanda mulai mengembangkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk dalam bidang pendidikan (Hasanah: 2023). Pendidikan kemudian dijadikan alat politik kolonial untuk mengontrol masyarakat dan mendukung kepentingan penjajah. Sistem pendidikan yang diterapkan di daerah jajahan berbeda dengan sistem pendidikan di negeri Belanda karena lebih diarahkan untuk kepentingan kolonial. Pendidikan bagi masyarakat pribumi pada masa colonial belanda dirancang secara khusus bagi penduduk asli Indonesia, sistem ini tumbuh dengan bersamaan dengan Pendidikan Barat yang ditujukan kepada orang Eropa dan sebagian kecil dari kalangan elit lokal.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan untuk pribumi menunjukkan karakter yang berbeda karena disesuaikan dengan keadaan sosial di komunitas lokal serta kepentingan dari pemerintah penjajah. Secara umum, pendidikan ini lebih sederhana baik dalam hal materi ajar, infrastruktur, maupun kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial, masyarakat pribumi juga memiliki metode pendidikan tradisional yang berkembang secara mandiri. Salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah pendidikan agama di pesantren. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, serta pemahaman keagamaan masyarakat. Kegiatan pembelajaran di pesantren umumnya dilaksanakan melalui metode pengajian kitab, sorogan, dan bandongan yang dibimbing langsung oleh seorang kiai. Meskipun tidak menggunakan sistem pendidikan Barat, pesantren tetap berfungsi sebagai pusat pendidikan yang memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat pribumi (Oneng Nurul Bariyah: 2024).

Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan Barat pada masa kolonial tidak sepenuhnya ditujukan untuk mencerdaskan seluruh masyarakat pribumi. Pendidikan tersebut lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial, terutama dalam menyediakan tenaga kerja terdidik yang dapat membantu

administrasi pemerintahan dan kepentingan ekonomi kolonial (Pasi & Harahap, 2020).

Beberapa tujuan pendidikan Barat antara lain:

1. **Kepentingan Politik**
Pendidikan dijadikan sarana untuk memperkuat kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Melalui pendidikan, pemerintah kolonial dapat membentuk masyarakat yang patuh kepada pemerintah penjajah.
2. **Kepentingan Ekonomi**
Pendidikan bertujuan menciptakan tenaga kerja murah yang dapat digunakan dalam administrasi pemerintahan dan perusahaan kolonial.
3. **Mendukung Sistem Eksploitasi**
Belanda membutuhkan tenaga terdidik yang dapat membantu administrasi kolonial, sehingga pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan kata lain, pendidikan Barat lebih berfungsi sebagai alat penjajahan daripada sebagai sarana pengembangan masyarakat. Selain tujuan Pendidikan barat juga mempunyai ciri-ciri pendidikan barat (Kolonial), Pendidikan Barat pada masa kolonial memiliki beberapa karakteristik khusus:

1. **Bersifat Sekuler**
Sekolah kolonial tidak mengajarkan pendidikan agama Islam meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Hal ini dilakukan karena pemerintah Belanda menjalankan politik "netral agama".
2. **Kurikulum Terbatas**
Pada sekolah dasar bagi pribumi seperti *Volkschool*, kurikulum cenderung sederhana dan terbatas pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun pada sekolah yang lebih tinggi seperti ELS, MULO, dan HBS, kurikulum lebih luas dan mengikuti standar pendidikan di Belanda. Pendidikan tersebut hanya bertujuan membentuk kemampuan dasar bagi pekerjaan administratif.
3. **Bersifat Elitis**
Sekolah kolonial hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti anak bangsawan, anak priyayi, anak pegawai pemerintah, Rakyat biasa hampir tidak mendapat kesempatan pendidikan.
4. **Menggunakan Bahasa Belanda**
Bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Belanda, sehingga hanya sedikit orang pribumi yang mampu mengikuti pendidikan tersebut. (Drs. H. Mahmud:)

Pendidikan Eropa

Pendidikan Eropa pada masa kolonial merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menggunakan standar pendidikan Barat yang berlaku di negara Belanda. Sistem pendidikan ini pada awalnya diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, seperti keturunan Belanda dan warga Eropa lainnya. Dalam perkembangannya, sebagian kecil anak pribumi dari kalangan bangsawan atau

keluarga pejabat juga diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan tersebut. Pendidikan Eropa memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan untuk masyarakat pribumi karena didukung oleh tenaga pengajar yang lebih terlatih, kurikulum yang lebih luas, serta fasilitas pendidikan yang lebih baik. Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran sehingga siswa diharapkan dapat memahami budaya dan sistem administrasi Barat. Sistem pendidikan ini juga menjadi salah satu sarana bagi pemerintah kolonial untuk menanamkan nilai-nilai dan pola pikir yang mendukung keberlangsungan kekuasaan kolonial di wilayah jajahan (S. Nasution: 2021).

Selain itu, pendidikan Eropa juga mencerminkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat kolonial. Pemerintah kolonial secara sengaja membedakan sistem pendidikan berdasarkan golongan masyarakat untuk menjaga jarak sosial antara bangsa Eropa dan masyarakat pribumi. Dengan adanya sistem pendidikan yang berbeda tersebut, pemerintah kolonial dapat mempertahankan dominasi politik dan sosialnya di Hindia Belanda. Oleh karena itu, pendidikan Eropa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai alat politik yang memperkuat sistem kekuasaan kolonial (Hasbullah: 2020). Perkembangan pendidikan di Eropa juga dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Barat yang memandang pendidikan sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik agar mampu menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sistematis melalui lembaga pendidikan formal yang memiliki kurikulum, jenjang pendidikan, serta metode pembelajaran yang terstruktur dengan baik. Proses pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan rasional melalui pendekatan ilmiah yang menekankan logika dan sains. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga didorong untuk memahami, menganalisis, serta mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Eropa memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar perkembangan masyarakat modern (Gert J. J. Biesta: 2021).

Di samping itu, pendidikan di Eropa juga sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga-lembaga pendidikannya diarahkan untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan akademis serta keterampilan praktis yang diperlukan di berbagai aspek kehidupan. Berkat sistem pendidikan yang sistematis dan terencana, negara-negara Eropa dapat menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, disiplin, dan memiliki cara berpikir yang progresif. Inilah yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu elemen kunci dalam mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya di Eropa (Adri Efferi: 2020). Guru dipandang sebagai faktor utama yang menentukan kualitas proses pembelajaran serta perkembangan intelektual dan karakter peserta didik. Oleh

karena itu, untuk menjadi seorang guru diperlukan proses seleksi yang ketat serta kualifikasi akademik yang tinggi. Standar yang tinggi diterapkan karena pemerintah dan masyarakat meyakini bahwa kualitas guru sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengembang potensi peserta didik dalam proses pendidikan (Linda Darling Hammond: 2021).

Kurikulum pendidikan Eropa pada masa kolonial dirancang mengikuti pola pendidikan yang berlaku di Belanda. Materi pelajaran yang diajarkan mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Belanda, matematika, ilmu pengetahuan alam, sejarah, geografi, serta ilmu sosial. Selain itu, siswa juga mempelajari pengetahuan tentang budaya dan sejarah Eropa yang bertujuan untuk menanamkan identitas Barat dalam diri peserta didik. Penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar menjadi ciri khas utama dari pendidikan ini karena bahasa tersebut dianggap sebagai sarana penting untuk mengakses ilmu pengetahuan dan menjalankan administrasi pemerintahan kolonial. Di samping mata pelajaran akademik, pendidikan Eropa juga menekankan pembentukan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir rasional. Sistem pengajaran yang diterapkan mengikuti metode pendidikan modern yang berkembang di Eropa pada saat itu. Hal ini membuat kualitas pendidikan Eropa jauh lebih maju dibandingkan dengan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat pribumi, yang umumnya hanya menekankan keterampilan dasar dan pendidikan praktis. Perbedaan kurikulum tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan dalam sistem pendidikan kolonial (Teguh Triwiyanto: 2022).

Dalam proses perkembangan, pendidikan di Eropa juga mengalami pembaruan dengan munculnya sistem formal yang lebih terorganisir. Kurikulum dirancang dengan lebih sistematis dengan pembagian jenjang pendidikan yang jelas, dimulai dari dasar hingga pendidikan tinggi. Selain itu, metode pengajaran yang diterapkan lebih menekankan pendekatan ilmiah, observasi, serta penerapan metode pengajaran yang logis dan terstruktur. Pendidikan tidak lagi berfokus hanya pada pengajaran oleh guru, tetapi mulai memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang melalui proses belajar yang aktif (Muhammad Yasin: 2024).

Tujuan utama pendidikan Eropa pada masa kolonial adalah untuk mempersiapkan tenaga terdidik yang dapat mendukung kelangsungan pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Melalui pendidikan ini, pemerintah kolonial berusaha mencetak individu yang memiliki kemampuan intelektual dan administratif yang memadai untuk mengisi berbagai jabatan dalam pemerintahan maupun sektor ekonomi kolonial. Pendidikan tersebut juga bertujuan untuk mempertahankan dominasi budaya Barat dengan menanamkan nilai-nilai, cara berpikir, serta gaya hidup Eropa kepada para siswa. (Haryanto: 2023) Selain itu, pendidikan Eropa juga berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial yang ada dalam masyarakat kolonial. Dengan memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada golongan Eropa, pemerintah kolonial dapat memastikan bahwa posisi penting dalam pemerintahan tetap didominasi oleh mereka. Sementara itu, akses pendidikan yang terbatas bagi masyarakat pribumi membuat mereka sulit

untuk mencapai kedudukan yang sama dengan golongan Eropa. Dengan demikian, pendidikan Eropa menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan kolonial di wilayah jajahan.

Beberapa lembaga pendidikan yang termasuk dalam kategori pendidikan Eropa pada masa kolonial antara lain *Europeesche Lagere School (ELS)*, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, dan *Hogere Burger School (HBS)*. ELS merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Sekolah ini memberikan pendidikan dasar dengan kurikulum yang hampir sama dengan sekolah dasar di Belanda. Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar utama dan materi pelajaran disusun dengan standar pendidikan Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di ELS, siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yaitu MULO. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama dan memberikan pelajaran yang lebih luas seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa asing, serta ilmu sosial. Pendidikan di MULO bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja dalam bidang administrasi pemerintahan. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi adalah HBS yang setara dengan sekolah menengah atas. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih kompleks dan menekankan penguasaan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. HBS juga menjadi salah satu jalur pendidikan yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Belanda. Sekolah-sekolah tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan Eropa pada masa kolonial dirancang secara berjenjang dan memiliki standar pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi (Arif Rohman: 2022).

Pendidikan Priyayi

Pendidikan priyayi adalah sistem pendidikan yang diperuntukkan bagi golongan priyayi (bangsawan atau elite birokrasi pribumi) pada masa kolonial Belanda. Pendidikan ini bertujuan menyiapkan anak-anak priyayi menjadi pegawai pemerintah kolonial atau pejabat birokrasi. Sekolah yang menjadi jalur utama pendidikan priyayi adalah OSVIA (*Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren*) yaitu sekolah khusus untuk mendidik calon pegawai pemerintah pribumi. Bisa disimpulkan bahwa Pendidikan priyayi yaitu Pendidikan bagi anak-anak bangsawan atau keluarga pejabat pribumi yang diarahkan untuk menjadi aparat birokrasi kolonial serta mempertahankan kedudukan sosial priyayi dalam masyarakat. Pendidikan priyayi biasanya diadakan di institusi sekolah yang menerapkan sistem pendidikan ala Barat. Kurikulum yang disajikan banyak terinspirasi dari metode pengajaran Belanda, baik dalam teknik belajar, materi yang diajarkan, maupun penggunaan bahasa pengantar. Bahasa Belanda menjadi bahasa utama dalam proses belajar, sehingga murid dari kalangan priyayi bisa lebih memahami sistem administrasi dan budaya Barat. Materi yang diberikan mencakup keterampilan membaca, menulis, berhitung, serta beragam pengetahuan umum yang berkaitan dengan administrasi pemerintah. Pada masa kolonial Belanda, kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat pribumi sangat terbatas,

Kondisi tersebut menimbulkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tokoh yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan adalah Raden Ajeng Kartini, yang mendorong agar perempuan pribumi memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, tujuan pendidikan ini tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga untuk membentuk karakter birokrat yang teratur dan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Pendidikan priyayi umumnya berlangsung di sekolah yang menerapkan sistem pengajaran ala Barat. Kurikulum yang disajikan banyak terinspirasi dari metode pengajaran Belanda, baik dalam teknik belajar, materi pembelajaran, maupun penggunaan bahasa pengantar. Bahasa Belanda menjadi bahasa utama dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dari kalangan priyayi dapat lebih memahami sistem administrasi dan budaya Barat. Materi yang disampaikan mencakup keterampilan membaca, menulis, berhitung, serta berbagai pengetahuan umum terkait administrasi pemerintah. Dengan demikian, tujuan pendidikan ini tidak sekedar untuk memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga untuk membentuk karakter birokrat yang teratur dan mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik. (Agus Wibowo: 2021) Berdasarkan isi buku, pendidikan priyayi memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Khusus untuk kalangan elite
Tidak semua masyarakat pribumi bisa masuk sekolah ini, Sekolah seperti OSVIA biasanya hanya menerima anak dari keluarga pejabat pemerintah atau priyayi.
2. Bertujuan mencetak pegawai pemerintah
Pendidikan priyayi menekankan pada ilmu pemerintahan dan administrasi, karena lulusannya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah di daerah.
3. Menggunakan budaya dan bahasa Belanda
Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda, sehingga siswa harus menguasai bahasa dan budaya Belanda.
4. Menggabungkan pendidikan Barat dan budaya Jawa
Walaupun belajar ilmu pemerintahan modern, siswa tetap diajarkan budaya Jawa seperti tembang, karawitan, dan seni tradisional sebagai bagian dari identitas priyayi.

Tujuan utama pendidikan priyayi pada masa kolonial adalah:

1. Menyediakan pegawai pribumi untuk membantu administrasi pemerintahan Belanda.
2. Mempertahankan struktur sosial kolonial, di mana priyayi menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat.
3. Membentuk elite pribumi yang terdidik, yang memahami sistem Barat tetapi tetap berasal dari masyarakat lokal.

Pendidikan Santri Awal Abad 20

Pendidikan pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang sejak lama di Indonesia dan memiliki karakteristik

yang khas dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kiai yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan pendidikan sekaligus pembimbing spiritual bagi para santri. Dalam sistem pendidikan pesantren, para santri tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga tinggal di lingkungan pondok sehingga proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar di pesantren umumnya berfokus pada pengkajian ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta berbagai kitab klasik karya para ulama terdahulu yang sering disebut sebagai kitab kuning. Melalui pembelajaran tersebut, para santri diajarkan untuk memahami ajaran Islam secara mendalam sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara kiai dan santri dalam pesantren juga bersifat sangat dekat karena proses pendidikan tidak hanya berlangsung dalam bentuk pengajaran formal, tetapi juga melalui keteladanan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh kiai kepada para santri (Ahmad Baso: 2021).

Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren juga memiliki peran sosial yang penting dalam masyarakat. Pesantren sering menjadi pusat kegiatan keagamaan, tempat penyebaran dakwah Islam, serta sarana pembinaan moral bagi masyarakat sekitar. Kehidupan di pesantren yang menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian, serta kebersamaan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter para santri. Melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, ibadah berjamaah, dan aktivitas sosial, para santri dilatih untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, serta rasa hormat terhadap guru dan sesama. Dengan demikian, pendidikan pesantren tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama secara teoritis, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki akhlak yang baik serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Mujamil Qomar: 2020).

Pada awal abad ke-20, kebijakan Politik Etis (*Ethische Politiek*) mulai diberlakukan. Pemerintah Belanda mulai memperhatikan pendidikan pribumi, namun masih terbatas dan bertujuan praktis. Tiga program utama Politik Etis yaitu Irigasi, Emigrasi, Edukasi. Dari ketiga program itu, edukasi memberikan dampak penting didirikannya sekolah guru seperti Kweekschool dan terbentuknya golongan cendekiawan muda yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, pendidikan santri di Indonesia masih didominasi oleh sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusat di pesantren, surau, masjid, dan rumah para ulama. Sistem pendidikan ini telah berkembang sejak masuknya Islam ke Nusantara dan berfungsi sebagai sarana utama dalam menyebarkan ajaran Islam serta membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Dalam praktiknya, pendidikan santri menekankan pada penguatan keimanan, penguasaan ilmu-ilmu agama, serta pembentukan moral dan akhlak para peserta didik.

Salah satu ciri khas pendidikan pesantren adalah penggunaan metode pembelajaran tradisional dalam mempelajari kitab-kitab klasik Islam yang sering disebut sebagai kitab kuning. Kitab kuning merupakan kumpulan kitab yang ditulis oleh para ulama klasik dan berisi berbagai ilmu keislaman seperti fiqh, tafsir, hadits, tauhid, dan tasawuf. Dalam mempelajari kitab tersebut, pesantren biasanya

menggunakan metode sorogan dan bandongan yang telah berkembang sejak lama dalam tradisi pendidikan Islam (Abuddin Nata: 2021).

Metode sorogan merupakan sistem pembelajaran individual di mana seorang santri membaca atau menjelaskan isi kitab di hadapan kiai atau ustadz kemudian guru akan memberikan koreksi, penjelasan, dan bimbingan secara langsung. Metode ini menuntut santri untuk mempersiapkan diri secara mandiri sebelum menghadap guru karena mereka harus memahami terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Sistem sorogan dianggap efektif dalam melatih kemampuan membaca kitab serta memperdalam pemahaman santri terhadap materi yang dipelajari. Sementara itu, metode bandongan merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Dalam metode ini, kiai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi kitab, sementara para santri menyimak, mencatat, dan memberikan tanda tertentu pada kitab yang mereka pelajari. Metode bandongan biasanya digunakan ketika jumlah santri cukup banyak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara bersama-sama. Sistem ini memungkinkan penyampaian materi secara lebih luas sekaligus memperkuat tradisi keilmuan yang berkembang di pesantren (Zamakhsari Mas'ud: 2020).

Kurikulum pendidikan santri pada masa itu bersifat *agamasentris*, artinya hampir seluruh materi pembelajaran berfokus pada ilmu-ilmu keislaman. Materi yang dipelajari biasanya mencakup fiqh, tauhid, tafsir, hadits, tasawuf, serta ilmu bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf. Sumber pembelajaran utama berasal dari kitab-kitab klasik atau yang dikenal sebagai kitab kuning. Tujuan utama pendidikan tersebut adalah mencetak santri yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan mampu menjadi ulama atau tokoh agama di masyarakat. Namun, memasuki awal abad ke-20 muncul kritik terhadap sistem pendidikan tradisional ini. Sebagian kalangan menilai bahwa kurikulum yang terlalu berfokus pada ilmu agama membuat umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan perkembangan sosial modern. Kondisi ini mendorong lahirnya gerakan pembaruan pendidikan Islam yang mencoba mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, beberapa tokoh Islam mulai melakukan reformasi pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan yang lebih modern seperti madrasah dan sekolah Islam.

Lembaga-lembaga ini mulai menggunakan sistem kelas, kurikulum yang lebih luas, serta metode pengajaran yang lebih sistematis. Meski demikian, pesantren sebagai pusat pendidikan santri tetap mempertahankan sebagian tradisi lama sambil secara bertahap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan santri pada awal abad ke-20 berada pada fase transisi antara sistem tradisional yang berfokus pada ilmu agama dan upaya modernisasi yang mencoba menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Perubahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia (Awal: 2023).

Pada awal abad ke-20, pendidikan santri di Indonesia mulai berkembang melalui lembaga pesantren yang dikelola oleh kiai. Pesantren berperan sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang tidak hanya menawarkan pengajaran

agama, tetapi juga sebagai arena pengembangan moral dan karakter masyarakat. Sistem pendidikan ini berbeda dibandingkan dengan pendekatan pendidikan Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda, karena lebih mengutamakan penguasaan ilmu keislaman dan pembentukan akhlak. Selain menambah wawasan tentang ilmu agama, kehidupan santri di pesantren juga menekankan disiplin, kemandirian, dan kesederhanaan. Para santri menetap di asrama atau pondok yang biasanya terletak di sekitar rumah kiai atau di lingkungan pesantren. Dalam kehidupan sehari-hari, para santri tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pesantren yang bertujuan menumbuhkan sikap tanggung jawab serta memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Pada masa tersebut, pesantren juga memegang peran penting dalam menjaga dan mempertahankan identitas keagamaan masyarakat lokal di tengah kuatnya pengaruh sistem pendidikan kolonial. Banyak kiai menjadikan pesantren sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan para santri. Oleh sebab itu, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia pada awal abad ke-20 (Aziz Masyhuri: 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara pendidikan Barat dan pendidikan yang berkembang di kalangan masyarakat pribumi. Pendidikan Barat yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial lebih ditujukan kepada bangsa Eropa serta sebagian kecil golongan elite pribumi seperti priyayi. Pendidikan tersebut menggunakan sistem dan kurikulum yang mengikuti model pendidikan di Belanda dengan tujuan utama untuk mendukung kepentingan administrasi dan pemerintahan kolonial. Sementara itu, sebagian besar masyarakat pribumi memperoleh pendidikan melalui lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman sekaligus membentuk karakter dan moral para santri. Selain itu, terdapat pula pendidikan yang diperuntukkan bagi kalangan priyayi yang diarahkan untuk menyiapkan tenaga birokrasi pribumi yang dapat membantu jalannya pemerintahan kolonial. Perbedaan sistem pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pada masa kolonial belum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dualisme pendidikan pada masa kolonial tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan, tetapi juga memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial dalam masyarakat. Meskipun demikian, pendidikan yang berkembang pada masa tersebut juga memberikan pengaruh penting terhadap munculnya kelompok masyarakat terdidik yang kemudian berperan dalam perkembangan pemikiran dan pergerakan nasional di Indonesia.

Selain menimbulkan perbedaan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, sistem pendidikan kolonial pada awal abad ke-20 juga berdampak

pada terbentuknya pola kehidupan sosial masyarakat yang cenderung terpisah berdasarkan golongan. Masyarakat yang memperoleh pendidikan Barat umumnya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan kedudukan yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat pribumi. Namun di sisi lain, perkembangan pendidikan, baik pendidikan Barat maupun pendidikan pesantren, turut memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan. Kesadaran tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan kolonial Belanda.

DAFTAR RUJUKAN

- Awal, Dari, Abad Ke- Hingga, and Periode Kontemporer. "MODERNISASI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA :," 2023, 3-4.
- Drs. H. Mahmud, M.Si. "MUHAMMADIYAH DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA," n.d.
- Fakhriansyah, Muhammad, Intan Ranti, and Permatasari Patoni. "Akses Pendidikan Bagi Pribumi Pada Periode Etis" 8, no. 2 (1930): 122-47.
- Haryanto Sugeng, "PERSEPSI SANTRI TERHADAP PERILAKU KEPEMIMPINAN KIAI DI PONDOK PESANTREN.Pasuruan:Kementrian Agama RI,2012.
- Madyan,dkk.(2024)."Perbandingan Historis Sistem Pendidikan Kolonial Belanda dan Pendidikan Indonesia Masa Kini"
- Bariyah, Oneng Nurul."Dinamika Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Sidoarjo: Anggota IKAPI JawaTimur,2024.
- Nasution,S."Sejarah Pendidikan Indonesia".Jakarta:Bumi aksara,2021
- Hasbullah. "Dasar-dasar Ilmu Pendidikan".Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2020.
- Biesta, Gert J. J. World-Centred Education: A View for the Present. London: Routledge, 2021.
- Efferi, Adri. Manajemen Pendidikan: Menyingkap Tabir Pengelolaan Lembaga Pendidikan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Darling-Hammond, Linda. Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World. San Francisco: Jossey-Bass, 2021.
- Triwiyanto, Teguh. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Yasin, Muhammad, dkk. Buku Ajar Pengantar Pendidikan. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Haryanto. Sejarah Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta: UNY Press, 2023.
- Rohman, Arif. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press, 2022.
- Wibowo, Agus. Pendidikan yang Berkebudayaan. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Baso, Ahmad. Pesantren Studies: Buku Pedoman Pendidikan Pesantren. Jakarta: Pustaka Afid, 2021.
- Qomar, Mujamil. Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Erlangga, 2020.

- Nata, Abuddin. Pendidikan Islam di Era Global. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Mas'ud, Zamakhsyari. Tradisi Keilmuan Pesantren. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- "Modernisasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia." 2023.
- Masyhuri, Aziz. 99 Kiai Kharismatik Indonesia. Yogyakarta: Diva Press, 2023.
- Munir, Arsyul, dkk. Dari Santri Untuk Bangsa. Tasikmalaya: Perkumpulan Cemerlang Rumah Indonesia, 2025.
- Nasution, S. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi, 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES, 2011.